## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku


Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Ali Wisnubroto, *Praktik Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, Jakarta: Galazy Puspa Mega, 2002.

Aloysius Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1993.

Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

C. Maya Indah S, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Salatiga: Widya Sari, 2010.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Estiyarso, *Penyempurnaan Penyidikan dalam Rangka Penuntutan*, Jakarta: Kejaksaan Agung RI, t.t.

Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.

H. Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.

Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, 2012.

Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.

Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2011.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2012.

M. Marwan, *Kasus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2001.

Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1998.

Muladi, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2005.

Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2007.

Muschin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Reza Saputra, *Konsep Dasar Kriminologi*, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, Cetakan Pertama, 2024.

Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2014.

Soerjano Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian*, Jakarta, 2007.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 2014.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.

Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan Area University Press, 2012.

Theo Van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban*, Jakarta: ELSAM, 2002.

Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Acara Pidana Indonesia (dalam Teori dan Praktik)*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023.

Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang: Setara Press, 2014.

Zulkarnin Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

**B. Jurnal, Artikel, dan Hasil Penelitian**

**1) Jurnal/Artikel Ilmiah**

Andyanto dan Hidayat, "Pertanggungjawaban Penyidik Terhadao Terjadinya Salah Tangkap", *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 5, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Wirajaya Sumenep, September 2018, hlm. 58.

Efendi, Saparudin, dan Rina Khairani Pancaningrum, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona)", *Jurnal Education and Development*, Vol. 9, No. 3, Agustus 2021, hlm. 591.

Feryando, "Implementation of Compensation Claim's Mechanism through Pretrial for Error In Persona in the Criminal Justice System", *Ius Poenale*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 2, Issue 2, Juli–Desember 2021, hlm. 137–138.

Hilda Hilmiah Dimyati, "Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pasar Modal", *E-Journal State Islamic University*, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 341.

Moh. Rifa'i, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis", *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 1, Universitas Nurul Jadid, 2018, hlm. 23.

Muhammad Firdho Efendi Maggalupang, "Pertanggungjawaban Hukum Aparat Penegak Hukum dalam Kasus Salah Tangkap di Indonesia", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 14, No. 1, Oktober 2025, hlm. 6.

Rachmact Trijono, "Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 terhadap Komponen dan Besaran Ganti Kerugian", *Jurnal Living Law*, Vol. 11, No. 2, Oktober 2019, hlm. 82.

Supriyadi Widodo Eddyono, "Komentar atas Pengaturan Penangkapan dalam Rancangan KUHAP", Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2013, hlm. 4–5.

Shidarta, "Perlindungan dan Perlindungan sebagai Kosa Kata Hukum", BINUS Business Law, 27 Juli 2025 (diakses 9 September 2025).

**2) Skripsi/Tesis**

Angga Nugraha Sihombing, "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Pekerja pada PT. PLN (Persero) Kitsumbagut", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2017, hlm. 3.

Dennis Rian Praditia, "Tanggungjawab Penyidik dalam Kasus Salah Tangkap", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2019, hlm. 56.

M. Arnanda Khurniawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak-Anak oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Jambi", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, 2022, hlm. 28.

Mega Syintia, "Pertanggungjawaban Hukum Akibat Praktik Salah Tangkap atau Error In Persona dalam Kasus Pembunuhan Anggota Porli di Aceh Utara (Studi Kasus di Polda Aceh)", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam–Banda Aceh, 2019, hlm. 40–41.

Muhammad Taufik Aminudin, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024, hlm. 19.

Putri Andriani Fajarwati, "Perlidungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Putusan Pengadilan atas Sita Eksekutorial pada Objek Tanah dan Bangunan yang Sudah Dibebani Hak Tanggungan Dihubungkan dengan HIR Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2018.

Rayhan Ananta Yukas, "Tinjauan Yuridis Viktimologis Mengenai Korban Penipuan Bisnis Fiktif di Social Media Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008", Skripsi, Universitas Pasundan Bandung, 2022, hlm. 47.

Shynta Soplantila, "Penerapan Hak Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015", Artikel Skripsi, Manado: UNSRAT, 2017, hlm. 40.

Toni Aji, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedar Narkotika di Wilayah Hukum Polres Ogan Komering Ulu Timur (Studi Putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2016/PN.Bta)", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020, hlm. 24.

**3) Wawancara**

Wawancara dengan Ajun Komisaris Polisi Hartoto, S.H., Penyidik Unit Ditreskrimum, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, 21 Juli 2025.

Wawancara dengan Ajun Komisaris Besar Polisi Teguh Wahono, S.H., M.H., Penyidik, melalui jaringan telepon, 3 Juli 2025.

Wawancara dengan Bapak Guntar Mahendro, S.H, sebagai Humas Lemabaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, di Lemabaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 20 Januari 2025.

**C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 2.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 butir 20.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 7 ayat (1).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 10.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 16.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 95 ayat (1).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 184.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 angka 2.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 16 ayat (1).

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, Pasal 1 angka 2.

**D. Data Internet**

Kamuslengkap.com, "Arti Kata Error In Persona Dalam Kamus Istilah Hukum", https://kamuslengkap.com/kamus/hukum/arti-kata/error-in-persona/ diakses pada 26 Mei 2025.

Polrestabanan.com, "Inovasi Teknologi dalam Penegakan Hukum oleh Polri" https://polrestabanan.com/inovasi-teknologi-dalam-penegakan-hukum-oleh-polri/ diakses pada 20 Novermber 2025.

Shidarta, "Perlindungan dan Perlindungan sebagai Kosa Kata Hukum."https://business-law.binus.ac.id/2025/07/27/perlindungan-dan-pelindungan-sebagai-kosa-kata-hukum/#:~:text=Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia%20(KBBI,(perbuatan%20dan%20sebagainya)%20memperlindungi diakses pada 9 September 2025.